

Oleh sebab itu permasalahan lingkungan sangat krusial jika dibicarakan dengan perkembangan politik saat ini. Kepentingan-kepentingan yang terjadi dalam dunia politik akan mampu mempengaruhi keberadaan lingkungan yang ada disekitarnya. Banyak dari pengembang maupun pemerintah telah menunjukkan kepentingannya dengan mengorbankan lingkungan-lingkungan yang ada disekitarnya. Politik lingkungan berhasil membuat ketertarikan tersendiri untuk selalu dikaji. Dalam hal ini selalu berkaitan dengan politik penguasaan dan pemilikan sumber daya alam dan perdagangan produknya. Dalam arti politik adalah dari sisi strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya alam bagi masyarakat atau berpihak pada swasta yang nantinya akan berujung pada kepentingan politik para pengembang. Padahal lingkungan mempunyai peran penting untuk keberhasilan hidup dari masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu persoalan lingkungan juga dapat memicu terjadinya sebuah konflik.

Dalam perkembangannya, permasalahan lingkungan terutama di negara Indonesia semakin banyak ditemui. Terutama pada kota-kota besar yang menjadi tujuan kaum modernis untuk membangun gedung-gedung pencakar langit dan menghilangkan fungsi RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang seharusnya menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola wilayah.

Salah satu persoalan yang sering terjadi kaitannya dengan pembangunan adalah proses tukar guling tanah desa atau juga perebutan hak milik tanah tersebut. Kebijakan pertanahan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda tersebut menjadi landasan bagi Undang-Undang Pokok Agraria yang dikenal

sebagai UU No. 5/1960 Undang-Undang tersebut berisi peraturan yang juga berazaskan domain verklaring menurut Agrarische Wet, yaitu negara berhak berkuasa atas tanah yang tidak terbukti ada pemiliknya sehingga tanah-tanah tersebut dapat diakui menjadi milik pemerintah. Peraturan ini rupanya menjadi akar permasalahan dari konflik-konflik hak atas tanah yang terjadi di kemudian hari. Permasalahan yang seringkali muncul adalah konflik hak atas tanah antara rakyat melawan pemilik modal dan negara, atau pemilik modal yang didukung oleh negara. Sebagai contoh konflik tanah adalah yang terjadi di Riau, konflik ini terjadi antara suku Sakai yang merupakan penghuni sah rimba raya dan tanah Riau yang kaya akan minyak harus mengalami penderitaan karena harus meninggalkan tanah milik leluhurnya. Hal ini terjadi dikarenakan kasus perseteruan antara Suku Sakai dengan PT. Arara Abadi anak perusahaan Sinas Mas Grup. Hal ini terjadi pula di Papua yaitu tanah milik Suku Kumoro dan beberapa suku lainnya oleh PT Freeport Indonesia. Di Pulau Jawa pun tak ketinggalan, masalah konflik tanah pernah terjadi di Alas Tlogo, Pasuruan Jawa Timur dimana masyarakat setempat memperebtkan tanah dengan Marinir yang berujung pada penembakan terhadap warga. Dalam kasus ini yang menjadi pemeran bukanlah rakyat dengan rakyat, melainkan rakyat dengan pemodal besar atau rakyat dengan pemerintah.

Salah satu kota besar yang banyak mengalami hal tersebut adalah Surabaya. Sebagai kota metropolis kedua ini, Surabaya memang dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Sehingga kota ini selalu menjadi sasaran empuk bagi para pengembang terutama yang berasal dari

Masyarakat tersebut terus melakukan upaya demi merebut kembali hak mereka atas waduk tersebut. Sebelum diketahui publik masyarakat perdukahan sepat telah melakukan aksinya dalam beberapa tahun terakhir. Mulanya perlawanan mereka hanya dilakukan dengan pengetahuan seadanya. Warga melakukan aksi pertama kali dengan berdemo di kelurahan Lidah Kulon. Para warga yang didominasi oleh ibu-ibu tersebut membuat beberapa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap keputusan pihak pemkot dan pengembang tersebut.

Setelah tidak adanya niat baik dari pihak-pihak yang bersengketa tersebut masyarakat pun akhirnya memutuskan untuk melakukan demonstrasi ke ruang publik. Hal ini dilakukan setelah membentuk wadah untuk menampung aspirasi masyarakat di perdukahan sepat. Selain itu warga akhirnya mendapat dukungan dari pihak LSM lingkungan. Hal ini tentu saja membuat warga semakin yakin dan bersemangat dalam memperjuangkan waduk yang dinyatakan sebagai peninggalan leluhur tersebut.

Perjuangan masyarakat dukuh sepat dalam merebut Hak mereka atas Waduk tidak dilakukan secara sendiri. Masyarakat mulai terorganisir ketika mendapat bantuan dari beberapa LSM lingkungan, salah satunya adalah; WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), dan juga di dukung oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya. Para lembaga ini hadir dalam upaya membantu masyarakat untuk mempertahankan eksistensi lingkungan yang ada. Hal ini dikarenakan telah banyaknya lahan yang digunakan untuk penghijauan dirampas oleh para pihak pengembang untuk dijadikan gedung-gedung megah yang pastinya akan

mengganggu kesejahteraan lingkungan. LSM WALHI sudah lama memainkan peran penting dalam perjuangan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Sementara LBH adalah merupakan lembaga yang memang memberikan bantuan hukum kepada para korban ketidakadilan, masyarakat miskin, dan lain-lain.

Dalam hal ini aksi masyarakat ketika belum terorganisir dengan yang sudah terorganisir berbeda. Masyarakat yang mulanya hanya berdemo disekitar kelurahan kini telah berani memperlihatkan aksinya di depan publik. Beberapa kali masyarakat dengan dibantu oleh pihak tersebut melakukan aksi, mulai dari mendatangi gedung DPRD Surabaya, mendatangi gedung Pengadilan Negeri, hingga berusaha menemui Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Dalam hubungannya, manusia sangat berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Dalam banyak realitas kehidupan rusaknya lingkungan langsung ataupun tidak langsung diakibatkan oleh perilaku manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kesadaran terhadap lingkungan ini muncul dari kemampuan manusia untuk mengerti akan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupannya.⁸ Dewasa ini telah banyak pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana. Hal tersebut memang sulit dihindari apabila masyarakat disekitar tidak mengetahui bagaimana pentingnya lingkungan untuk dijaga. Kesadaran masyarakat yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pemerintah biasanya terwujud dalam berbagai aktifitas lingkungan maupun aktifitas kontrol lainnya.

⁸ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013) 37

hak Masyarakat Hukum Adat (P3MHA) Ammatoa Kajang yang pada akhir 2015 lalu telah disahkan menjadi Perda No. 9 tahun 2015.

Dalam penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengenai fokus dari objek penelitian. Pada penelitian dengan judul “Motif Masyarakat Dalam Aksi Mempertahankan Waduk Sepat Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya” ini peneliti akan lebih banyak membahas mengenai aksi-aksi yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan Waduk sebagai aset mereka. Selain itu teori yang akan digunakan juga berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

Penelitian kedua adalah skripsi dari Agust Eko Yuwono dari Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Penelitian ini berjudul “Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Agust Eko Yuwono ini adalah latar belakang masyarakat melakukan resistensi pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini adalah adanya kekhawatiran masyarakat akan terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas penambangan pabrik semen. Hal ini didukung dengan sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen yang dirasa tidak transparan. Kecurigaan masyarakat terhadap hasil AMDAL dan masyarakat tidak percaya janji-janji yang diberikan berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat. Kegiatan resistensi yang dilakukan masyarakat dalam hal ini adalah melakukan demonstrasi ke dinas-dinas terkait, menggelar seni budaya, melakukan

dialog-dialog dengan pemerintah serta PT. Semen Gresik Tbk, serta melakukan studi banding ke Tuban untuk melihat seberapa parah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan yang dilakukan PT. Semen Gresik Tbk.¹²

Dari penelitian diatas yang membedakan dengan judul yang akan diangkat oleh peneliti ini adalah dengan dilihat berdasarkan fokus masalah yang ada pada penelitian tersebut. Fokus masalah dalam penelitian sebelumnya adalah mengenai permasalahan AMDAL yang dirasa tidak transparan oleh masyarakat setempat sehingga menyebabkan masyarakat melakukan resistensi. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Motif Masyarakat Dalam Mempertahankan Waduk Sepat di Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya” adalah mengenai motif masyarakat dalam aksi mempertahankan Waduk Sepat yang dilakukan untuk mempertahankan aset leluhur yang telah dirampas oleh pengembang.

Penelitian ketiga adalah skripsi Nuke Faridha Wardhani dari Universitas Airlangga fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Politik yang berjudul “Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat Di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagai gerakan sosial yang dilakukan LSM bersama warga berdasar rasionalitas, yakni menginginkan waduk tersebut kembali seperti fungsinya sedia kala dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. LSM dan warga mempunyai beberapa strategi dalam upaya memperjuangkan

¹² Agus Eko Yuwono. *Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik Di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang, 2010)

menjadi alat utama sehingga peneliti pula yang menentukan keadaan lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali, atau sebaliknya bahwa lapangan akan menerima peneliti sebagai bagian dari anggota masyarakat disana sehingga data apapun bisa digali karena rasa kepercayaan masyarakat terhadap peneliti.

5) Memilih dan Menentukan Informan

Pada saat peneliti menjajagi lapangan, salah satu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah menentukan informan yang akan memberikan informasi banyak mengenai keadaan dilapangan. Pemilihan informan harus diperhatikan berdasarkan kriteria yang benar-benar representatif dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

Pada tahap ini peneliti telah menemukan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini akan dibantu oleh beberapa narasumber yang berasal dari Warga Dukuh Sepat itu sendiri, dan juga warga yang mengetahui permasalahan awal waduk sepat hingga terjadinya aksi masyarakat selama ini. Peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling* ketika memilih informan dilapangan.

6) Menyiapkan Instrumen Penelitian

Peneliti mempunyai posisi yang vital dalam hal ini. Peneliti merupakan pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan menganalisa data yang ada di lapangan tentunya yang berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan.

